

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PROFIL KEPEGAWAIAN

TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PROFIL KEPEGAWAIAN

TAHUN 2025



Disusun oleh :  
Bidang Pengembangan Kompetensi  
Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data  
dan Informasi Kepegawaian ASN  
Badan Kepegawaian Daerah : : : :  
Provinsi Kalimantan Tengah : : : :  
: : : :



***H. Agustiar Sabran***

***Gubernur Kalimantan Tengah***



***H. Edy Pratowo***  
***Wakil Gubernur Kalimantan Tengah***



**Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT**  
PLT. SEKRETARIS DAERAH



**LISDA ARRIYANA, S.Sos**  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



# DAFTAR ISI

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI                                                              | i  |
| KATA PENGANTAR                                                          | 1  |
| PENDAHULUAN                                                             | 2  |
| GAMBARAN UMUM BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAERAH<br>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 4  |
| DESKRIPSI ASN PEMERINTAH<br>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH                  | 13 |
| PENUTUP                                                                 | 23 |
| GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR<br>KALIMANTAN TENGAH                        | 24 |
| SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA<br>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                | 26 |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH                                                 | 27 |

## KATA PENGANTAR

Buku “Profil Aparatur Sipil Negara” Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk dokumen publikasi tentang data dan informasi kepegawaian yang disusun setiap akhir tahun. Penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta merupakan perwujudan tugas pokok dan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Buku Profil ini memuat gambaran tentang keadaan seluruh Aparatur Sipil Negara menurut status kepegawaiannya yang berada di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir Tahun 2025. Gambaran keadaan Aparatur Sipil Negara dalam buku profil ini disajikan dalam bentuk tabel, dilengkapi dengan diagram dan grafik.

Harapan kami, dengan disusunnya Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Disadari bahwa penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak guna perbaikan pada publikasi kedepannya. Akhirnya, semoga Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Palangka Raya, Januari 2026  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

**LISDA ARRIYANA, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196809011989112005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kebutuhan akan informasi yang akurat merupakan hal yang sangat penting di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Perencanaan dan pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang bersumber dari data yang valid. Oleh karena itu, instansi pemerintah berkewajiban untuk memelihara, mendokumentasikan, serta mengelola data yang selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk publikasi, sehingga mampu menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan mutakhir menjadi faktor yang sangat penting.

Data dan informasi kepegawaian yang tidak tersedia atau tidak tertata dengan baik akan menyulitkan pengambil kebijakan dalam menyusun rencana penataan kepegawaian, pengembangan pegawai, serta penguatan kelembagaan. Dengan tersedianya data yang lengkap dan informasi yang mutakhir, diharapkan dapat mendukung terwujudnya hasil yang optimal bagi semua pihak, baik pengambil keputusan maupun aparatur sebagai elemen yang dilayani.

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Buku Profil Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kepegawaian dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi aparatur, baik dari segi jumlah pegawai maupun karakteristiknya, meliputi jenis kelamin, golongan, agama, tingkat pendidikan, serta jabatan, baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural, sehingga dapat menggambarkan keadaan pegawai pada setiap Perangkat Daerah secara rinci.

2. Penyusunan Profil Kepegawaian bertujuan untuk mendokumentasikan serta menyajikan data dan informasi kepegawaian per Perangkat Daerah secara sistematis, akurat, dan mudah diakses.
3. Kelengkapan data dan informasi kepegawaian diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana pembangunan aparatur serta penataan kelembagaan yang berorientasi pada penguatan otonomi daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah daerah, dapat terwujud secara optimal.

### 1.3 METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian bersumber dari laporan Data Urut Kepangkatan (DUK) yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Data tersebut disusun berdasarkan ketentuan peraturan-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, data kepegawaian juga dihimpun melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) serta dipadukan dan disinkronisasikan dengan penggajian data keuangan yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) atau sistem keuangan daerah lainnya yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### 2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan dari seluruh Perangkat Daerah, berupa data kuantitatif, selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, serta data terpilah, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi kepegawaian yang lebih jelas, akurat, dan informatif.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **2.1 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang di bidang manajemen ASN daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi :

- perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
- pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
- pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Berikut ini diuraikan tentang uraian tugas dan fungsi unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepegawaian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat membawahi dan dibantu oleh:

#### **a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### **b. a. Subbagian Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.

### **3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN**

Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian ASN untuk meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi pegawai, persentase pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian dan pelayanan informasi kepegawaian yang terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Mutasi dan Promosi ASN**

Bidang Mutasi dan Promosi ASN dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN untuk meningkatkan persentase pengembangan karier ASN. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN**

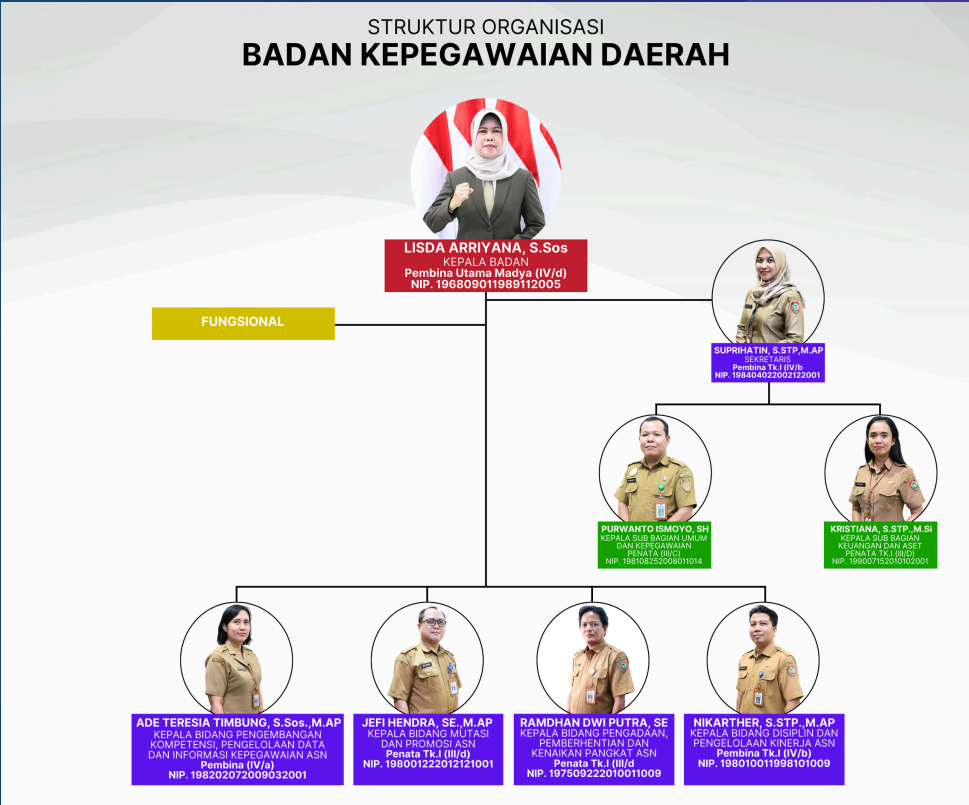
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemberhentian serta melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat ASN untuk meningkatkan persentase dan pembinaan karier sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **6. Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN**

Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN mempunyai tugas Melaksanakan penegakan disiplin, peningkatan kesejahteraan, dan pengelolaan kinerja ASN. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta pejabat yang menduduki per bulan Desember 2025, ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1  
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah





## 2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### A. VISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2025 – 2029 adalah:

***"MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUUT INDONESIA EMAS 2045"***

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah :

- 1.Kalteng Berkah. Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antarperiode di Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.Kalteng Maju. Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
- 3.Kalteng Bermartabat. Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang

dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.

## B. MISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka melaksanakan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah misi yang menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembangunan. Misi ini juga disusun sebagai arah dan batasan pembangunan yang akan dilakukan. Adapun misi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan SDA lokal.
2. Peningkatan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang beretika melalui pendidikan inklusif, sesuai dengan kaidah Belom Bahadat.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Dari kelima misi Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah sebagai Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kepegawaian di daerah. Hal ini telah tertuang dalam RENSTRA 2025-2029 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sejalan dengan misi ke Kelima yaitu Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

## 1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Selanjutnya BKD Provinsi Kalimantan Tengah mendukung salah satu indikator tujuan Reformasi Birokrasi yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan harapan dapat menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tengah serta tujuan Reformasi Birokrasi dalam hal ini sasaran yang terkait dengan bidang kepegawaian maka

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Mewujudkan Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berkinerja Tinggi, Serta Memastikan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi ASN Secara Efektif Dan Efisien” dengan indikator tujuan Indeks Profesionalitas ASN.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Adapun dalam rangka implementasi RPD tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian 5 (lima) tahun ke depan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Mewujudkan Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berkinerja Tinggi, Serta Memastikan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi ASN Secara Efektif Dan Efisien”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan Sasaran sebagai berikut “Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

| No | Tujuan                                                                                                                                                                              | Sasaran                                                                                                                            | Indikator Tujuan dan Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                              | 2025                                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Mewujudkan Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berkinerja Tinggi, Serta Memastikan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi ASN Secara Efektif Dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional | Indeks Profesionalitas ASN   | 78.55                                        | 79.00 | 79.00 | 79.50 | 80.00 |

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya. Metode pengisian Indeks Profesionalitas ASN yaitu Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemutakhiran data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk keperluan pengisian Indeks Profesionalitas ASN. Setelah melakukan pemutakhiran data SIASN, selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat oleh PNS dan BKD di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2025 berhasil meraih nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 81,5 dengan kategori tinggi . Capaian ini mencerminkan kualitas ASN Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung oleh kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, serta kedisiplinan aparatur yang terus mengalami peningkatan, sekaligus menjadi motivasi untuk memperkuat profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

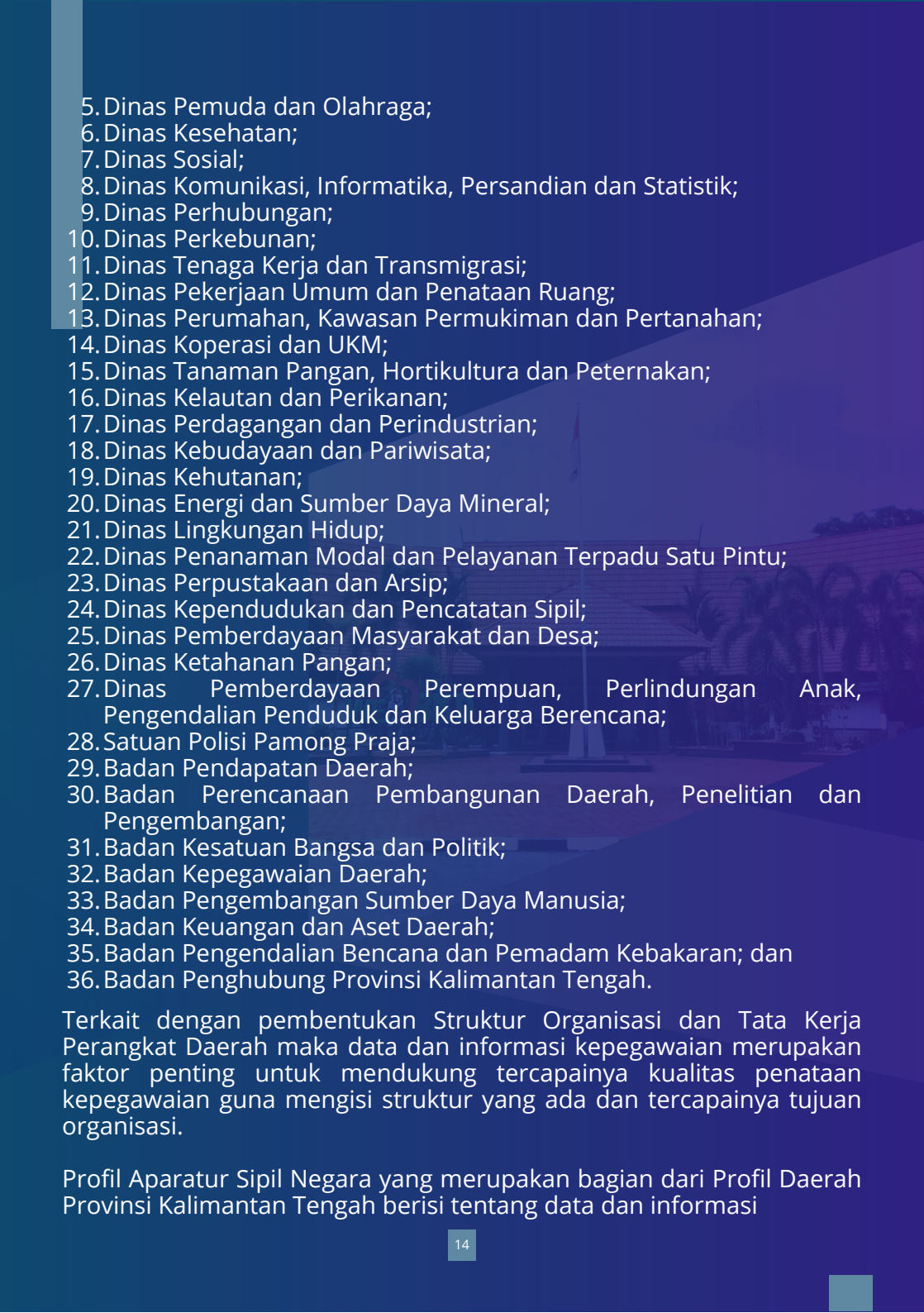
#### **3.1 GAMBARAN UMUM ASN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956.

Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Sekretaris Daerah yang mencakup 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Biro, Sekretariat DPRD, 24 (dua puluh empat) Dinas Daerah, 8 (delapan) Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus dan Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selengkapnya sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - c. Asisten Administrasi Umum
  - d. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - e. Biro Kesejahteraan Rakyat
  - f. Biro Hukum
  - g. Biro Perekonomian
  - h. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  - i. Biro Administrasi Pembangunan
  - j. Biro Organisasi
  - k. Biro Umum
  - l. Biro Administrasi Pimpinan
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan;

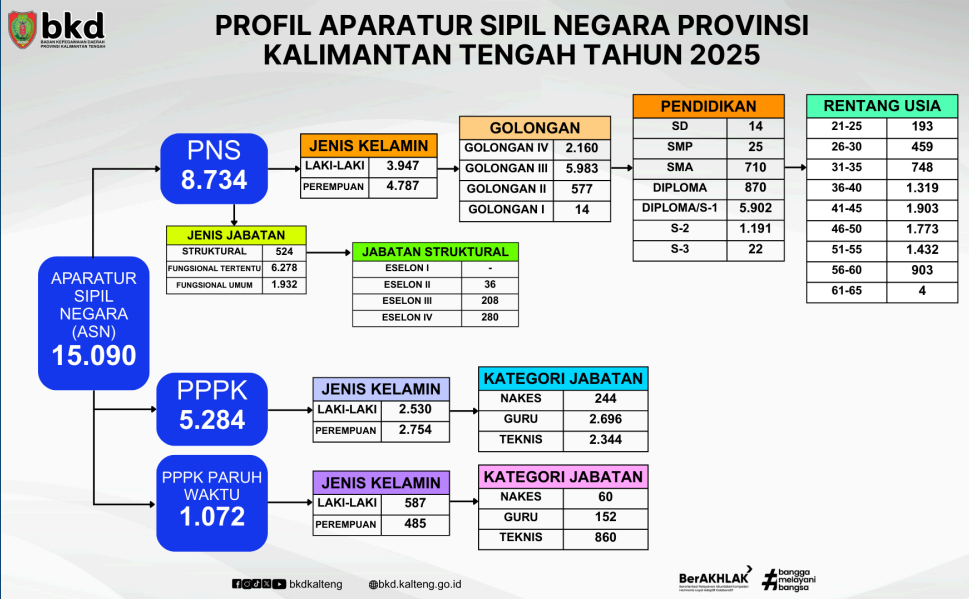
- 
5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  6. Dinas Kesehatan;
  7. Dinas Sosial;
  8. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
  9. Dinas Perhubungan;
  10. Dinas Perkebunan;
  11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  14. Dinas Koperasi dan UKM;
  15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
  16. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  19. Dinas Kehutanan;
  20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  21. Dinas Lingkungan Hidup;
  22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  23. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
  24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  26. Dinas Ketahanan Pangan;
  27. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  28. Satuan Polisi Pamong Praja;
  29. Badan Pendapatan Daerah;
  30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  32. Badan Kepegawaian Daerah;
  33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  34. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  35. Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran; dan
  36. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Terkait dengan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka data dan informasi kepegawaian merupakan faktor penting untuk mendukung tercapainya kualitas penataan kepegawaian guna mengisi struktur yang ada dan tercapainya tujuan organisasi.

Profil Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Profil Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berisi tentang data dan informasi

kepegawaian menggambarkan keadaan jumlah pegawai yang ada meliputi jenis kelamin, golongan/pangkat, eselon, tingkat pendidikan dan sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan aparatur secara umum dan rinci per Perangkat Daerah keadaan 31 Desember 2025.

Jumlah Aparatur Sipil Negara se-Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang terbaru sampai dengan Desember 2025 yaitu sebanyak 15.090 dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15.090 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 5.284 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.072 orang. Profil Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan, sebagai berikut:





### 3.2 KOMPOSISI ASN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. BERDASARKAN JENIS KELAMIN

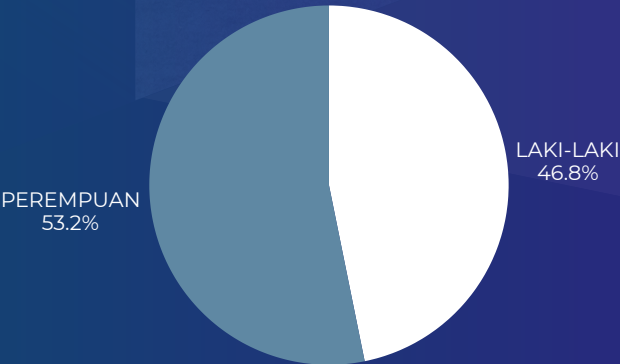
Komposisi perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis kelamin seperti tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin

| NO        | JENIS PEGAWAI    | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------|------------------|---------------|-----------|--------|
|           |                  | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| 1         | PNS              | 3.947         | 4.787     | 8.734  |
| 2         | PPPK             | 2.530         | 2.754     | 5.284  |
| 3         | PPPK PARUH WAKTU | 587           | 485       | 1.072  |
| TOTAL ASN |                  | 7.064         | 8026      | 15.090 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ASN Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh perempuan yang mencapai 53,2% dari total jumlah PNS yang ada, sedangkan ASN laki-laki mencapai 46,8%. Perbandingan nampak jelas pada Grafik di bawah ini:

Grafik 1  
Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



**B. BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN**

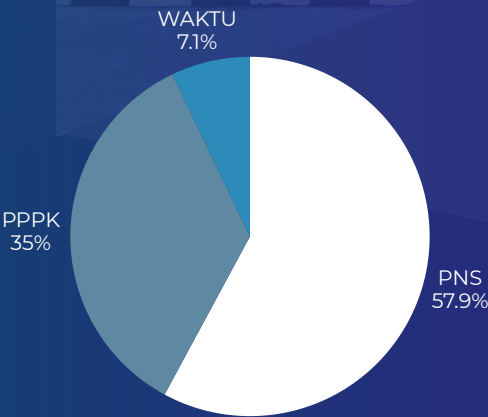
Komposisi perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kepegawaian seperti tersebut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kepegawaian**

| NO        | JENIS PEGAWAI    | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------|------------------|---------------|-----------|--------|
|           |                  | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| 1         | PNS              | 3.947         | 4.787     | 8.734  |
| 2         | PPPK             | 2.530         | 2.754     | 5.284  |
| 3         | PPPK PARUH WAKTU | 587           | 485       | 1.072  |
| TOTAL ASN |                  | 7.064         | 8026      | 15.090 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ASN Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh PNS yang mencapai 57,9% dari total jumlah ASN yang ada, sedangkan jumlah PPPK mencapai 35% dan PPPK Paruh Waktu 7,1%. Perbandingan nampak jelas pada Grafik di bawah ini:

**Grafik 2**  
**Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2025**



C. PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Komposisi data PNS menurut jenjang pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah keadaan Desember 2025 masih didominasi pendidikan Sarjana (S1) terutama bagi tenaga pendidik. Untuk melihat komposisi dan perbandingan jumlah ASN Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikannya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3  
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Kepegawaian

| JENJANG PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| SD                 | 12            | 2         | 14     |
| SMP                | 16            | 5         | 25     |
| SMA                | 505           | 209       | 710    |
| DIPLOMA            | 246           | 424       | 870    |
| D4/S-1             | 2584          | 3518      | 5902   |
| S-2                | 568           | 623       | 1191   |
| S-3                | 16            | 6         | 22     |

Grafik 3  
Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025



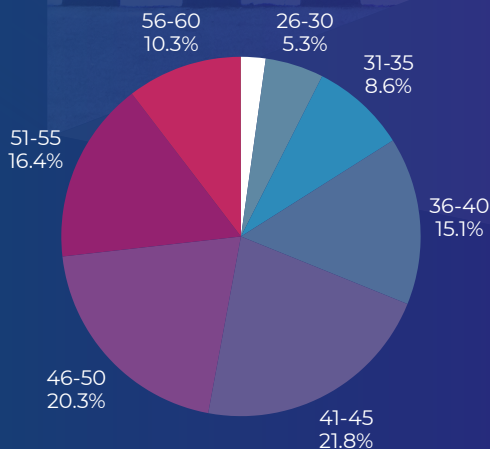
#### D. PNS BERDASARKAN RENTANG USIA

Rentang usia PNS merupakan pengelompok PNS berdasarkan umur dengan kategori Komposisi usia PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada akhir tahun 2025 rentang usia PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4  
Jumlah PNS berdasarkan Rentang Usia

| NO | RENTANG USIA | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| 1  | 21-25        | 193    |
| 2  | 26-30        | 459    |
| 3  | 31-35        | 748    |
| 4  | 36-40        | 1.319  |
| 5  | 41-45        | 1.903  |
| 6  | 46-50        | 1.773  |
| 7  | 51-55        | 1.432  |
| 8  | 56-60        | 903    |
| 9  | 61-65        | 4      |

Grafik 4  
Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Rentang Usia





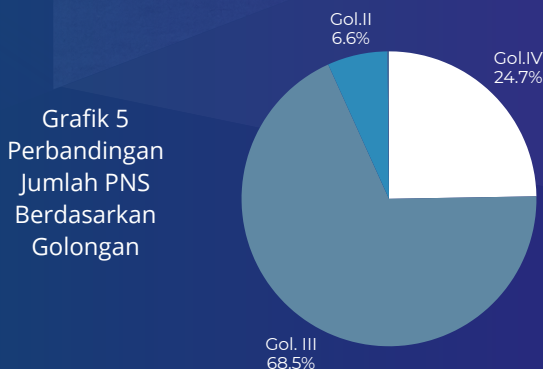
## E. PNS BERDASARKAN GOLONGAN

Komposisi perbandingan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, secara keseluruhan berdasarkan Golongan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5  
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

| GOLONGAN     |       |
|--------------|-------|
| GOLONGAN IV  | 2.160 |
| GOLONGAN III | 5.983 |
| GOLONGAN II  | 577   |
| GOLONGAN I   | 14    |

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PNS lingkup Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per Desember Tahun 2025 masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III sebanyak 5.983 orang atau 64,6%, hal ini disamping adanya PNS yang berasal dari jenjang pendidikan S1 pada saat melamar, PNS yang naik pangkat secara reguler maupun PNS yang naik pangkat melalui ujian penyesuaian pangkat. Kemudian diikuti oleh Pegawai Golongan IV sebanyak 2.160 orang atau setara dengan 23,3%% yang rata-rata adalah Pejabat Struktural maupun Fungsional tertentu, Golongan II sebanyak 577 orang atau 6,6% dan yang terkecil Golongan I sebanyak 14 orang atau setara dengan 0,16%. Grafik perbandingan PNS Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Golongan bisa dilihat dalam grafik di bawah ini:



## F. PNS BERDASARKAN ESELONERING JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

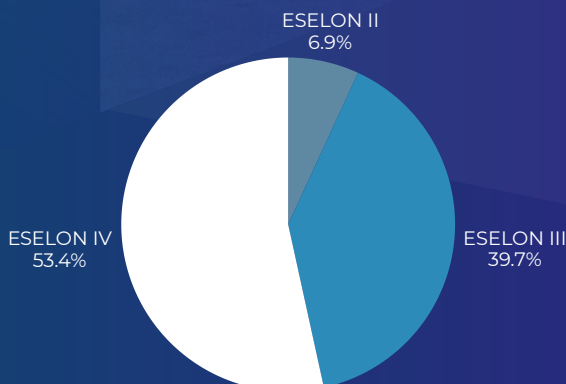
Data Pegawai berdasarkan Eselonering menggambarkan jumlah jabatan struktural yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menduduki Jabatan Struktural bisa dikelompokkan berdasarkan eselonering jabatannya, Tabel dan Grafik perbandingannya bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 6  
Jumlah PNS berdasarkan Eselonering

| JABATAN STRUKTURAL |     |
|--------------------|-----|
| ESELON I           | -   |
| ESELON II          | 36  |
| ESELON III         | 208 |
| ESELON IV          | 280 |

Dari tabel di atas, perbandingan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Eselonnya didominasi oleh Pejabat Eselon IV sebanyak 280 orang (53,4%), kemudian diikuti oleh Pejabat Eselon III sebanyak 208 orang (39,7%), dan Pejabat Eselon II sebanyak 36 orang (6,9%). Perbandingan PNS berdasarkan eselon dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 6  
Perbandingan Jumlah PNS  
Berdasarkan Golongan



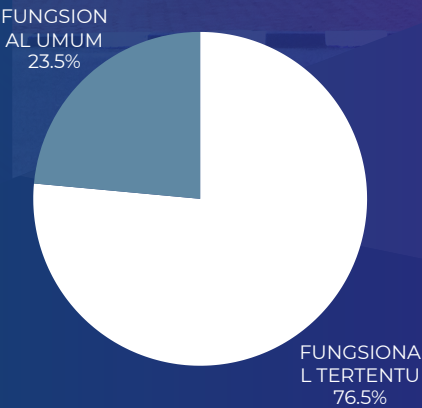
Selain menduduki Jabatan Struktural, terdapat pula PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang terdiri dari Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7  
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Fungsional

| JENIS JABATAN       |       |
|---------------------|-------|
| FUNGSIONAL TERTENTU | 6.278 |
| FUNGSIONAL UMUM     | 1.932 |
| JUMLAH              | 8.210 |

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 8.210 PNS yang terdiri dari Fungsional Tertentu sejumlah 6.278 PNS dan Fungsional Umum sejumlah 1.932 PNS. Untuk memperjelas gambaran terkait jenis jabatan fungsional, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 7  
Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional Tahun 2025

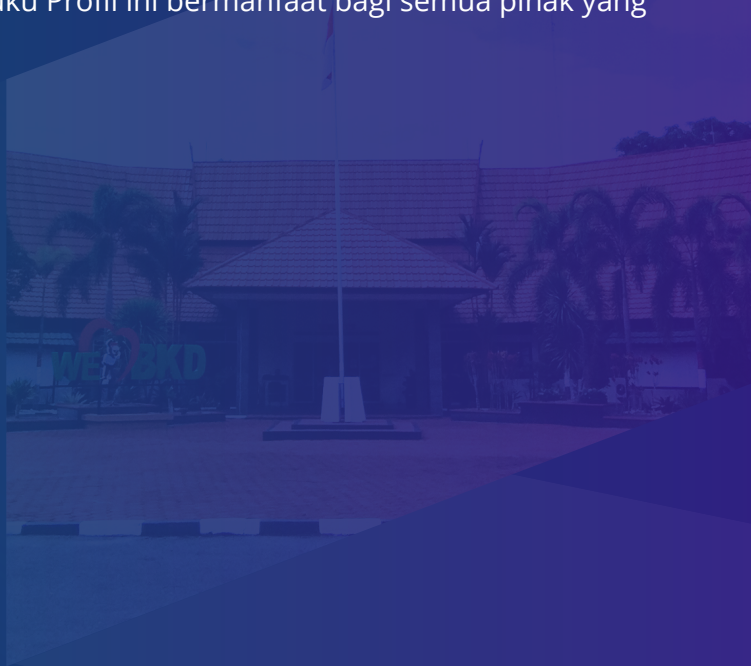


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perwujudan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Buku yang menggambarkan keadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini, sebagai salah satu bentuk publikasi dan dokumentasi manual yang akan disusun dan diterbitkan setiap akhir tahun.

Akhir kata semoga Buku Profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.







***H. Agustiar Sabran***  
*Gubernur Kalimantan Tengah*



***H. Edy Pratowo***  
*Wakil Gubernur Kalimantan Tengah*

## SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT**  
PLT. SEKRETARIS DAERAH



**LISDA ARRIYANA, S.Sos**  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## KEPALA PERANGKAT DAERAH



**Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT**  
PLT. SEKRETARIS DAERAH



**HAMKA, S.Pd., M.Pd**  
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG  
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER  
DAYA MANUSIA



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**  
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG  
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK



**YUAS ELKO, S.Sos., M.Si**  
STAF AHLI BIDANG EKONOMI,  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**Ir. HERSON B. ADEN, M.Si**  
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT



**Ir. HERSON B. ADEN, M.Si**  
ASISTEN ADMINISTRASI  
PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN



**Ir. SUNARTI**  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



## KEPALA PERANGKAT DAERAH



**JHON LIS BERGER, AP., M.Si**  
PLT. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH



**Drs. AKHMAD HUSAIN**  
PLT. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN  
RAKYAT



**MASKUR, S.H., M.H.**  
KEPALA BIRO HUKUM



**Drs. AKHMAD HUSAIN**  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN



**SAID SALIM, S.Kom**  
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



**SUHARNO, ST., M.Si**  
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG  
DAN JASA



**BETRI SUSILAWATI, S.Pi**  
PLT. KEPALA BIRO ORGANISASI



**JOHNI SONDER, S.STP., M.Si**  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PIMPINAN



**H. SITI MAABDAH MAKIAH,  
S.T., M.AP**  
PLT. KEPALA BIRO UMUM



## KEPALA PERANGKAT DAERAH



**ANANG DIRJO, SP.,MM**  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



**Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**MUHAMAD RUS'AN, S.Hut., M.Si**  
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK



**LISDA ARRIYANA, S.Sos**  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH



**NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd**  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



**SYAHFIRI, SE**  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH



**AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si**  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
BENCANA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN



**MUHAMMAD REZA PRABOWO,  
S.IP., MPA**  
PLT. KEPALA BADAN PENGHUBUNG



**Dr. PAJARUDINNOOR, M.Si**  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH



**EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP**  
PLT. INSPEKTUR



**MUHAMMAD REZA PRABOWO,  
S.IP., MPA**  
PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**AGUS SISWADI, S.Pd., M.Pd**  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

## KEPALA PERANGKAT DAERAH



**dr. SUYUTI SYAMSUL, MPMM**  
KEPALA DINAS KESEHATAN



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
KEPALA DINAS SOSIAL



**RANGGA LESMANA, S.IP.,MM**  
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK



**FARID WAJDI, A.K.S., MSW**  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI



**YULINDRA DEDY, S.STP.,M.Si**  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



**RIZKY RAMADHANA, ST.,MT**  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



**RENDY LESMANA, S.P., M.M.**  
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



**Dr.Ir.JUNI GULTOM**  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN



**Dr. RAHMAWATI, M.Si**  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM



**dr. SENIRIATY**  
PLT. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA



**SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.**  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

## KEPALA PERANGKAT DAERAH



**NORHANI, S.Sos., M.A.P**  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN



**JONI HARTA, SE, S.Hut, MM**  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si**  
KEPALA DINAS KEHUTANAN



**ADIAH CHANDRA SARI, SH., MH**  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
ARSIP



**TIRTA, S.Sos**  
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENDAFTARAN SIPIL



**ARYAWAN, S.IP, M.IP**  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



**SUTOYO, S.STP., M.AP**  
PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL



**dr.LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**SUTOYO, S.STP., M.AP**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU



**AGUS CANDRA, ST., MT**  
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



**BARU, S.Pd., M.Si.**  
KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA